PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Minggu Tanggal: 09 Mei 2021 Halaman: 1

Banyak Jalan Menuju "Roma"

Perbatasan Lokal DIY Sulit Disekat

Kalau kebijakan mendadak, itu pasti implementasinya juga tidak maksimal.

Ririn Dewi
Warga DIY

LIPUTAN KHUSUS

YOGYA, TRIBUN - Pelarangan mudik Lebaran di kawasan aglomerasi mendapat sambutan beragam dari masyarakat. Ada yang menilai pelarangan itu baik untuk menekan penyebaran virus corona. Namun, ada juga yang beranggapan cara itu tidak efektif.

Ririn Dewi (29) merasa tidak paham dengan kebijakan pelarangan mudik di wilayah aglomerasi. Dia tetap akan mudik, bagaimanapun caranya. "Memang dijaga? Ingat, seperti pepatah, banyak jalan menuju Roma, lho," katanya terkekeh.

● ke halaman 11

Kawasan Penyangga

- Menyekat antarkabupaten/kota di DIY merupakan hal sulit mengingat satu sama lain adalah kawasan penyangga.
- Yogyakarta-Sleman-Bantul (Kartamantul) misalnya. Lalu lintas warga di sini tak dianggap bepergian ke luar kota.
- -Begitu pula saat pergi ke Gunungkidul & Kulon Progo, akan dianggap bepergian dalam satu wilayah.
- Belum dengan banyaknya jalur yang bisa dilalui warga akan menyulitkan penyekatan di dalam DIY.
- Sebelumnya Yogyakarta Raya merupakan 1 dari 8 wilayah aglomerasi di Indonesia yang diizinkan mudik.
- Namun, tempo hari pemerintah menyatakan melarang mudik di semua wilayah, termasuk zona aglomerasi.
- Beberapa warga DIY pun masih akan bepergian di dalam DIY saat Lebaran nanti untuk keperluan silaturahmi/mudik.

GRAFIS/FAUZIA RAKHMAN

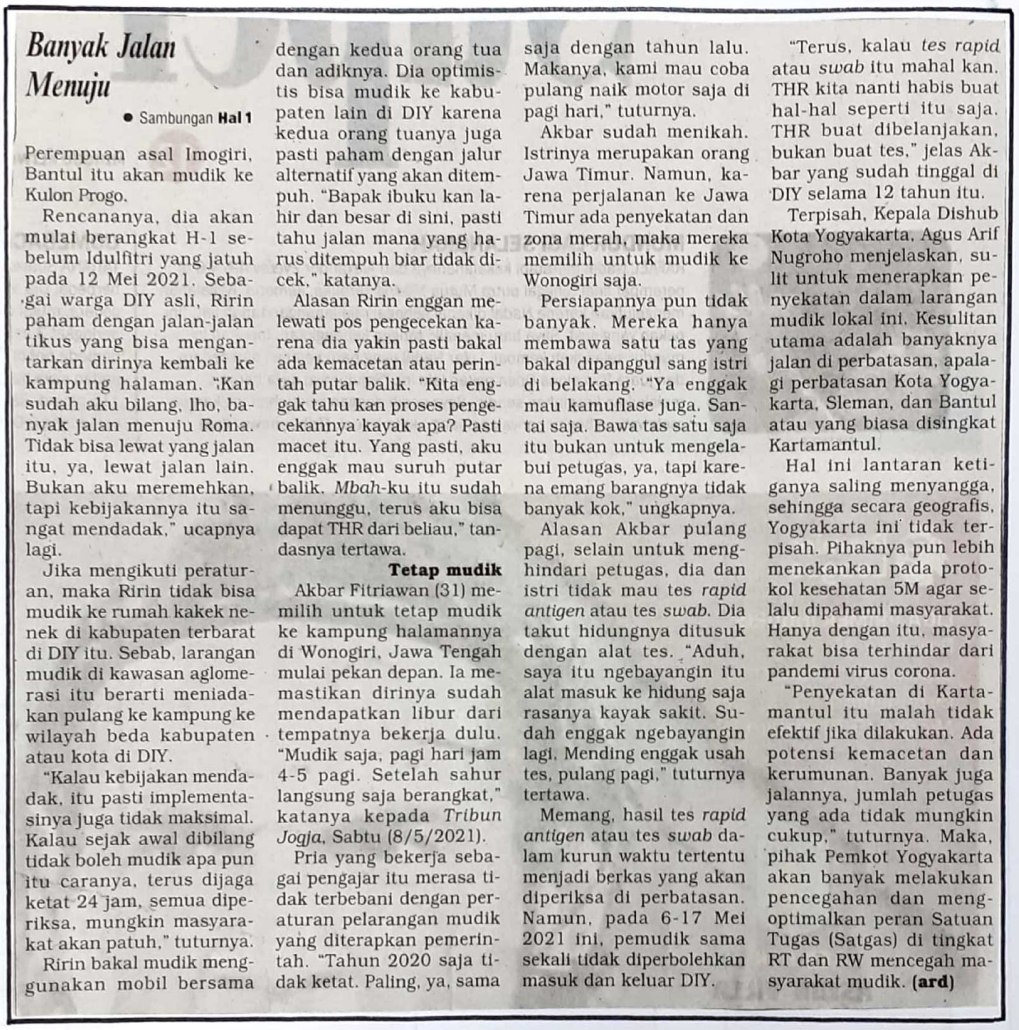

Banyak Jalan Menuju

● Sambungan **Hal 1**

Perempuan asal Imogiri, Bantul itu akan mudik ke Kulon Progo.

Rencananya, dia akan mulai berangkat H-1 sebelum Idulfitri yang jatuh pada 12 Mei 2021. Sebagai warga DIY asli, Ririn paham dengan jalan-jalan tikus yang bisa mengantarkan dirinya kembali ke kampung halaman. "Kan sudah aku bilang, lho, banyak jalan menuju Roma. Tidak bisa lewat yang jalan itu, ya, lewat jalan lain. Bukan aku meremehkan, tapi kebijakannya itu sangat mendadak," ucapnya lagi.

Jika mengikuti peraturan, maka Ririn tidak bisa mudik ke rumah kakek nenek di kabupaten terbarat di DIY itu. Sebab, larangan mudik di kawasan aglomerasi itu berarti meniadakan pulang ke kampung ke wilayah beda kabupaten atau kota di DIY.

"Kalau kebijakan mendadak, itu pasti implementasinya juga tidak maksimal. Kalau sejak awal dibilang tidak boleh mudik apa pun itu caranya, terus dijaga ketat 24 jam, semua diperiksa, mungkin masyarakat akan patuh," tuturnya.

Ririn bakal mudik menggunakan mobil bersama dengan kedua orang tua dan adiknya. Dia optimistis bisa mudik ke kabupaten lain di DIY karena kedua orang tuanya juga pasti paham dengan jalur alternatif yang akan ditempuh. "Bapak ibuku kan lahir dan besar di sini, pasti tahu jalan mana yang harus ditempuh biar tidak dicek," katanya.

Alasan Ririn enggan melewati pos pengecekan karena dia yakin pasti bakal ada kemacetan atau perintah putar balik. "Kita enggak tahu kan proses pengecekannya kayak apa? Pasti macet itu. Yang pasti, aku enggak mau suruh putar balik. *Mbah*-ku itu sudah menunggu, terus aku bisa dapat THR dari beliau," tandasnya tertawa.

Tetap mudik

Akbar Fitriawan (31) memilih untuk tetap mudik ke kampung halamannya di Wonogiri, Jawa Tengah mulai pekan depan. Ia memastikan dirinya sudah mendapatkan libur dari tempatnya bekerja dulu. "Mudik saja, pagi hari jam 4-5 pagi. Setelah sahur langsung saja berangkat," katanya kepada *Tribun Jogja*, Sabtu (8/5/2021).

Pria yang bekerja sebagai pengajar itu merasa tidak terbebani dengan peraturan pelarangan mudik yang diterapkan pemerintah. "Tahun 2020 saja tidak ketat. Paling, ya, sama saja dengan tahun lalu. Makanya, kami mau coba pulang naik motor saja di pagi hari," tuturnya.

Akbar sudah menikah. Istrinya merupakan orang Jawa Timur. Namun, karena perjalanan ke Jawa Timur ada penyekatan dan zona merah, maka mereka memilih untuk mudik ke Wonogiri saja.

Persiapannya pun tidak banyak. Mereka hanya membawa satu tas yang bakal dipanggul sang istri di belakang. "Ya enggak mau kamuflase juga. Santai saja. Bawa tas satu saja itu bukan untuk mengelabui petugas, ya, tapi karena emang barangnya tidak banyak kok," ungkapnya.

Alasan Akbar pulang pagi, selain untuk menghindari petugas, dia dan istri tidak mau tes *rapid antigen* atau tes *swab*. Dia takut hidungnya ditusuk dengan alat tes. "Aduh, saya itu ngebayangin itu alat masuk ke hidung saja rasanya kayak sakit. Sudah enggak ngebayangin lagi. Mending enggak usah tes, pulang pagi," tuturnya tertawa.

Memang, hasil tes *rapid antigen* atau tes *swab* dalam kurun waktu tertentu menjadi berkas yang akan diperiksa di perbatasan. Namun, pada 6-17 Mei 2021 ini, pemudik sama sekali tidak diperbolehkan masuk dan keluar DIY.

"Terus, kalau *tes rapid* atau *swab* itu mahal kan. THR kita nanti habis buat hal-hal seperti itu saja. THR buat dibelanjakan, bukan buat tes," jelas Akbar yang sudah tinggal di DIY selama 12 tahun itu.

Terpisah, Kepala Dishub Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho menjelaskan, sulit untuk menerapkan penyekatan dalam larangan mudik lokal ini. Kesulitan utama adalah banyaknya jalan di perbatasan, apalagi perbatasan Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul atau yang biasa disingkat Kartamantul.

Hal ini lantaran ketiganya saling menyangga, sehingga secara geografis, Yogyakarta ini tidak terpisah. Pihaknya pun lebih menekankan pada protokol kesehatan 5M agar selalu dipahami masyarakat. Hanya dengan itu, masyarakat bisa terhindar dari pandemi virus corona.

"Penyekatan di Kartamantul itu malah tidak efektif jika dilakukan. Ada potensi kemacetan dan kerumunan. Banyak juga jalannya, jumlah petugas yang ada tidak mungkin cukup," tuturnya. Maka, pihak Pemkot Yogyakarta akan banyak melakukan pencegahan dan mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) di tingkat RT dan RW mencegah masyarakat mudik. (**ard**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005